

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia. Kedudukan desa tidak hanya berkaitan dengan fungsi administratif, tetapi juga mencakup penyelenggaraan kehidupan sosial masyarakat, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta pelaksanaan pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat. Dalam konteks tersebut, desa memiliki posisi yang strategis karena menjadi salah satu tingkatan pemerintahan yang berhubungan secara langsung dengan masyarakat. Kedekatan tersebut memungkinkan Pemerintah Desa untuk mengetahui berbagai kebutuhan, permasalahan, serta potensi yang dimiliki masyarakat sebagai dasar dalam penyelenggaraan pembangunan.

Secara nasional, keberadaan desa sebagai bagian penting dalam pembangunan dapat dilihat dari besarnya jumlah wilayah administrasi pemerintahan yang berada pada tingkat desa. Badan Pusat Statistik melalui Pendataan Potensi Desa (Podes) 2024 mencatat sebanyak 84.276 wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa yang terdiri atas 75.753 desa, 8.486 kelurahan, serta 37 unit permukiman transmigrasi atau satuan permukiman transmigrasi. Besarnya jumlah wilayah tersebut menunjukkan bahwa pembangunan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintahan pada tingkat desa. Kondisi masing-masing desa yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi, geografis, dan kebutuhan masyarakat yang berbeda juga menuntut Pemerintah Desa

untuk memiliki kemampuan dalam mengelola pembangunan sesuai dengan kondisi masyarakatnya.

Pembangunan desa pada dasarnya tidak hanya merupakan tanggung jawab Pemerintah Desa, tetapi membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam setiap prosesnya. Masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan karena masyarakat merupakan pihak yang secara langsung merasakan dampak dari berbagai kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan di lingkungan mereka. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat diperlukan agar pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya didasarkan pada keputusan pemerintah, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan, aspirasi, serta kondisi nyata yang terdapat di tengah masyarakat. Dengan adanya keterlibatan tersebut, masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai pihak yang dapat memberikan kontribusi dalam menentukan arah dan pelaksanaan pembangunan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, mulai dari keterlibatan dalam proses perencanaan, penyampaian aspirasi dan pendapat, keikutsertaan dalam pelaksanaan kegiatan, hingga keterlibatan dalam pengawasan dan evaluasi pembangunan. Partisipasi tersebut menjadi penting karena masyarakat memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai kondisi lingkungan mereka sendiri. Masyarakat dapat mengetahui persoalan yang dihadapi secara langsung sehingga keterlibatannya dapat membantu Pemerintah Desa dalam menentukan prioritas pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan desa

tidak hanya dapat dilihat dari terlaksananya suatu program, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat memperoleh ruang untuk terlibat dalam proses pembangunan tersebut.

Dalam upaya mendorong keterlibatan masyarakat, komunikasi menjadi salah satu unsur yang memiliki peranan penting. Melalui komunikasi, Pemerintah Desa dapat menyampaikan berbagai informasi mengenai program pembangunan kepada masyarakat, mulai dari tujuan, manfaat, bentuk kegiatan, waktu pelaksanaan, hingga bentuk keterlibatan yang diharapkan. Informasi yang disampaikan secara jelas dapat membantu masyarakat memahami program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Sebaliknya, komunikasi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, pertanyaan, kritik, saran, maupun kebutuhan yang berkaitan dengan pembangunan desa. Dengan demikian, komunikasi antara Pemerintah Desa dan masyarakat tidak hanya berlangsung dalam bentuk penyampaian informasi satu arah, tetapi juga dapat menjadi ruang interaksi yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dan pemahaman antara kedua belah pihak.

Komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam konteks pembangunan tentunya membutuhkan pengelolaan yang baik. Penyampaian informasi kepada masyarakat tidak dapat dilakukan hanya dengan menyampaikan pesan, tetapi perlu mempertimbangkan tujuan yang hendak dicapai, siapa masyarakat yang menjadi sasaran, bagaimana pesan disusun, siapa yang menyampaikan pesan, media yang digunakan, serta bagaimana komunikasi tersebut dilaksanakan dan dievaluasi. Oleh karena itu, diperlukan suatu strategi komunikasi

agar proses penyampaian informasi pembangunan dapat dilakukan secara terarah dan sesuai dengan kondisi masyarakat. Strategi komunikasi memungkinkan Pemerintah Desa menentukan langkah-langkah komunikasi yang digunakan untuk membangun pemahaman masyarakat sekaligus mendorong keterlibatan mereka dalam proses pembangunan.

Strategi komunikasi menjadi semakin penting karena masyarakat memiliki karakteristik yang beragam. Perbedaan usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, kondisi sosial, pola interaksi, serta kemampuan dalam mengakses informasi dapat memengaruhi cara masyarakat menerima dan memahami pesan yang disampaikan oleh Pemerintah Desa. Informasi pembangunan yang disampaikan dengan cara yang sama kepada seluruh masyarakat belum tentu dapat diterima dan dipahami secara sama pula. Oleh karena itu, Pemerintah Desa perlu memahami karakteristik masyarakat sebagai sasaran komunikasi agar pesan yang disampaikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.

Perkembangan teknologi komunikasi juga memberikan berbagai alternatif bagi Pemerintah Desa dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Pemanfaatan media digital dapat membantu penyebaran informasi mengenai kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara lebih cepat dan luas. Media sosial, aplikasi pesan, serta berbagai bentuk media digital lainnya dapat menjadi sarana tambahan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Namun, penggunaan media digital tidak serta-merta menjamin bahwa seluruh masyarakat dapat menerima dan memahami informasi secara merata. Tidak semua masyarakat memiliki tingkat akses, kemampuan, dan kebiasaan penggunaan teknologi yang

sama. Oleh sebab itu, komunikasi secara langsung melalui musyawarah, pertemuan masyarakat, penyampaian informasi melalui perangkat kewilayahan, serta komunikasi kelompok masih memiliki peranan penting dalam menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Desa perlu menentukan strategi komunikasi yang tidak hanya berorientasi pada penggunaan media, tetapi juga memperhatikan keseluruhan proses komunikasi. Strategi tersebut mencakup bagaimana Pemerintah Desa menentukan tujuan komunikasi, memahami karakteristik masyarakat sebagai khalayak, menyusun pesan pembangunan, menentukan pihak yang berperan sebagai komunikator, memilih media yang sesuai, melaksanakan komunikasi, serta mengevaluasi proses komunikasi yang telah dilakukan. Melalui strategi yang tepat, komunikasi pembangunan diharapkan tidak berhenti pada tersampainya informasi, tetapi dapat membangun pemahaman masyarakat dan membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Untuk membedah dan menyelesaikan permasalahan tersebut, penelitian ini dianalisis secara murni menggunakan Teori Strategi Komunikasi Onong Uchjana Effendy (2009). Effendy mendefinisikan strategi komunikasi sebagai paduan antara perencanaan komunikasi (*communication planning*) dan manajemen komunikasi (*communication management*) untuk mencapai tujuan komunikasi yang telah ditetapkan. Pemilihan teori ini didasarkan pada kebutuhan untuk melihat strategi komunikasi secara holistik—mulai dari tahap merancang pesan dan saluran sebelum program diluncurkan, hingga tahap mengelola komunikasi, menangani

konflik, dan mengevaluasi umpan balik warga saat pembangunan berjalan di lapangan.

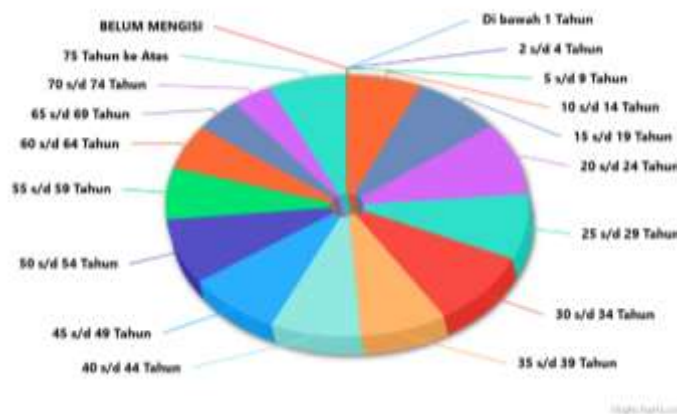
Pemilihan teori tersebut juga penting karena strategi komunikasi tidak hanya dapat dilihat dari media atau pesan yang digunakan. Suatu komunikasi dapat dikatakan strategis apabila terdapat tujuan yang jelas, perencanaan yang sesuai dengan karakteristik khalayak, pengelolaan pesan dan komunikator yang tepat, pemilihan media yang sesuai, serta evaluasi terhadap pelaksanaan komunikasi. Dengan demikian, teori Effendy memberikan kerangka untuk memahami bagaimana Pemerintah Desa menyusun dan mengelola komunikasi sebagai bagian dari upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan..

Desa Cikalong, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung dipilih sebagai lokasi penelitian karena berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti, terdapat masyarakat yang terlibat dalam berbagai kegiatan desa, termasuk kegiatan pembangunan dan musyawarah desa. Kondisi tersebut menjadi perhatian peneliti untuk memahami bagaimana Pemerintah Desa menyampaikan informasi pembangunan, membangun ruang komunikasi, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan

Sebagian masyarakat menunjukkan keterlibatan dalam kegiatan pembangunan dan musyawarah, sementara sebagian masyarakat lainnya belum menunjukkan tingkat keterlibatan yang sama. Kondisi tersebut menjadi penting untuk dikaji karena perbedaan keterlibatan masyarakat dapat berkaitan dengan bagaimana informasi pembangunan disampaikan, bagaimana masyarakat memperoleh informasi, bagaimana ruang komunikasi antara Pemerintah Desa dan

masyarakat dibangun, serta bagaimana masyarakat memberikan respons terhadap komunikasi yang dilakukan.

Gambar 1. 1 Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Cikalong Tahun 2026



Sumber: Data Kependudukan Desa Cikalong, 2026 (<https://cikalong.desa.id/data-statistik/rentang-umur>)

Berdasarkan data kependudukan Desa Cikalong tahun 2026, penduduk Desa Cikalong tersebar dalam berbagai kelompok rentang umur, mulai dari usia di bawah 1 tahun hingga kelompok usia 75 tahun ke atas. Sebaran tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Desa Cikalong memiliki karakteristik usia yang beragam. Kondisi demografis tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam proses komunikasi Pemerintah Desa, karena masyarakat sebagai sasaran komunikasi memiliki karakteristik dan kemungkinan kebutuhan informasi yang berbeda.

Keberagaman kelompok umur tersebut menjadi penting dalam kaitannya dengan penyampaian informasi mengenai pembangunan desa. Pemerintah Desa perlu mempertimbangkan karakteristik masyarakat dalam menentukan cara

penyampaian informasi dan membangun ruang komunikasi agar informasi pembangunan dapat diterima oleh berbagai kelompok masyarakat. Dengan demikian, data kependudukan tersebut memberikan gambaran mengenai karakteristik masyarakat Desa Cikalong yang menjadi bagian dari konteks dalam melihat bagaimana strategi komunikasi Pemerintah Desa dilaksanakan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Pengamatan awal tersebut tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat di Desa Cikalong rendah atau tinggi. Sebaliknya, kondisi tersebut menjadi titik awal bagi peneliti untuk memahami lebih lanjut bagaimana strategi komunikasi Pemerintah Desa dilaksanakan dan bagaimana masyarakat merespons proses komunikasi tersebut. Penelitian ini dengan demikian tidak diarahkan untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat secara kuantitatif, tetapi untuk memperoleh pemahaman mengenai proses komunikasi yang berlangsung antara Pemerintah Desa dan masyarakat dalam konteks pembangunan. Dalam konteks Desa Cikalong, komunikasi Pemerintah Desa menjadi penting karena pembangunan membutuhkan koordinasi dan keterlibatan berbagai unsur masyarakat. Informasi mengenai pembangunan perlu disampaikan secara tepat agar masyarakat mengetahui program yang akan dilaksanakan dan memahami bentuk keterlibatan yang dapat diberikan. Pada saat yang sama, Pemerintah Desa juga membutuhkan informasi dari masyarakat mengenai kebutuhan dan kondisi yang mereka hadapi. Proses komunikasi tersebut dapat menjadi sarana untuk mempertemukan kepentingan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara lebih sesuai dengan kondisi setempat.

Dengan demikian, persoalan dalam penelitian ini bukan semata-mata mengenai tinggi atau rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, melainkan mengenai bagaimana strategi komunikasi Pemerintah Desa direncanakan dan dikelola untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Fokus tersebut menempatkan komunikasi sebagai proses yang berlangsung secara dua arah, yaitu Pemerintah Desa menyampaikan informasi sekaligus menerima aspirasi dan respons masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, penelitian diharapkan dapat menggambarkan praktik komunikasi Pemerintah Desa secara lebih mendalam berdasarkan pengalaman dan pandangan pihak-pihak yang terlibat.

Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin memperoleh gambaran secara mendalam mengenai strategi komunikasi Pemerintah Desa Cikalong. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali pengalaman, pandangan, serta praktik komunikasi dari pihak Pemerintah Desa maupun masyarakat melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan demikian, data yang diperoleh tidak hanya menggambarkan bentuk komunikasi yang digunakan, tetapi juga menjelaskan bagaimana komunikasi tersebut direncanakan, dilaksanakan, diterima, dan dievaluasi dalam konteks pembangunan desa.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mendeskripsikan strategi komunikasi Pemerintah Desa Cikalong dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, dengan menggunakan teori strategi komunikasi Onong Uchjana Effendy sebagai landasan teoritis utama. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai

bagaimana perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi diterapkan oleh Pemerintah Desa, sekaligus memahami respons masyarakat serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan strategi komunikasi tersebut.

Atas dasar pertimbangan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Strategi Komunikasi Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan (Studi Deskriptif Kualitatif di Desa Cikalong, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung)."

1.2 Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1.2.1 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada strategi komunikasi yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Cikalong dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Fokus penelitian ini dianalisis berdasarkan dimensi strategi komunikasi menurut Effendy, yaitu perencanaan komunikasi (*communication planning*) dan manajemen komunikasi (*communication management*), Onong Uchjana Effendy (2009):

1.2.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana perencanaan komunikasi (*communication planning*) Pemerintah Desa Cikalong dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan?
- 2) Bagaimana manajemen komunikasi (*communication management*) Pemerintah Desa Cikalong dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mendeskripsikan perencanaan komunikasi (*communication planning*) Pemerintah Desa Cikalong dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
- 2) Untuk mendeskripsikan manajemen komunikasi (*communication management*) Pemerintah Desa Cikalong dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1.3.2.1 Kegunaan Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian Ilmu Komunikasi, khususnya dalam bidang komunikasi pemerintahan dan komunikasi pembangunan desa. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi akademik mengenai strategi komunikasi Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memperkaya penerapan teori strategi komunikasi dalam konteks pemerintahan desa.

1.3.2.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Desa Cikalong dalam merumuskan dan mengembangkan strategi

komunikasi yang lebih efektif, partisipatif, dan sesuai dengan karakteristik masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Desa lainnya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pengelolaan komunikasi yang lebih terencana dan berkelanjutan.